

PERKAWINAN ADAT *MERARIQ* (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI NUSA TENGGARA BARAT*

Kaharuddin**

Abstract

Merariq is a unique marriage form in Lombok Sasak Moslem society. This research aims are 1) to understand the practice and process of merariq; 2) to explore the view of the Sasak Moslem society and; 3) to understand the relevancy merariq with the life of the Sasak Moslem society. The empiric sociologis and literature research have been done. The research location is Prapen village, Lombok Tengah, West Nusa Tenggara.

*The findings suggest that merariq usually was done by villagers or those who still practice up traditions. The merariq process begins with the boy elope with or kidnap the girl without nobody knows them, especially the girl's family. There are several reasons why merariq is done, 1) to show the seriousness of the boy; 2) to show his bravery, like a knight; 3) because of historical reasons and; 4) it is kind of competition. The Sasak Moslem society has two opinions relating merariq. **First**, from the lay people point of view. **Secondly**, from the educated people point of view. In the practice merariq often result a lot of conflict. Thus, it should be found other alternatives to avoid the negative effects. In conclusion, the merariq practice should be reconsidered.*

Kata kunci: merariq, menculik, hukum perkawinan Islam, Sasak, Lombok

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, tepatlah

apabila Islam maupun negara mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci. Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai bukti perhatian dari negara, yang secara yuridis-formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.¹

* Hasil Penelitian dengan biaya dari Ford Foudation, kerja sama dengan Center for Asia Pasific Studies (PSAP) Universitas Gadjah Mada Tahun 2006.

** Alumni Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2004-2006. sekarang staf peneliti pada Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gadjah Mada.

¹ Azhar Bashir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1. Dapat juga di baca dalam bukunya Soerjono Sockanto, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

Agar perkawinan dapat dilaksanakan kerabat dari pihak perempuan

dengan baik dan tujuannya dapat diwujudkan, maka syari'at Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etik-keagamaan, baik sebelum, selama proses, maupun setelah berlangsungnya akad perkawinan. Karena perkawinan pada dasarnya adalah *mitsaqan ghalidzan* (tali kuat) yang harus dipertahankan selamanya. Sementara perceraian meski dibenarkan, namun sangat dibenci oleh Allah. Sebagai langkah awal menuju perkawinan, Islam mensyari'atkan *khitbah* (peminangan), yaitu seorang pria seyogianya terlebih dahulu meminta persetujuan wali dan atau perempuan pilihannya agar bersedia menjadi pendamping hidupnya.² Dengan demikian, perkawinan dalam Islam dilakukan benar-benar atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta menghindari unsur paksaan.

Di Indoneisa terdapat berbagai bentuk perkawinan, dan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indoneisa adalah dengan cara peminangan. Cara ini banyak dilakukan seperti; daerah Jawa, Bugis dan Kalimantan. Akan tetapi ada juga yang melakukan dalam bentuk pelarian diri atau dalam terminologi hukum adat disebut kawin lari.³ Proses kawin lari ini dilakukan dengan cara melarikan (menculik) seorang gadis dari lingkungan dan pengawasannya, tanpa sepengetahuan orang tua maupun

Beberapa alasan kawin lari dilakukan yaitu untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan yang ditimbulkan oleh perkawinan dengan cara peminangan, atau untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datang dari pihak keluarga perempuan, terutama dari orang tua atau walinya. Alasan yang terakhir ini menurut Soekanto dan Taneko merupakan faktor utama dilakukannya kawin lari.⁴ Kawin lari ini menimbulkan implikasi negatif, sehingga dibeberapa daerah tertentu seperti Bugis, sanksi adat pelaku kawin lari dapat berupa pembunuhan. Karena bagi mereka, melarikan seorang gadis meskipun dengan tujuan untuk kawin adalah perbuatan *siri* (aib) yang menodai kehormatan keluarga.⁵

Hal di atas berbeda dengan masyarakat Muslim Sasak karena melihat kawin lari (*merariq*) umum dilakukan, bahkan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai tradisi yang perlu dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan merupakan simbol keberanian atau keinginan kuat seseorang untuk menikah. Sebaliknya, perkawinan dengan meminta izin pada orang tua perempuan (peminangan) sering kali dianggap sebagai hal yang tabu atau bahkan sebagai suatu penghinaan, karena menurutnya, anak perempuan bukanlah seperti *sirih* atau anak ayam yang dapat diminta begitu saja.⁶

² Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 138.

³ Soerjono Soekanto dan Soeman B. Taneko, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 246.

⁴ Sution Usman Aji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 105.

⁵ A.Z Abidin, 1995, *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung, hlm. 46.

⁶ Depdikbud, 1991, *Adat Istiadat Perkawinan di Lombok*, Penerbit Proyek Inventarisasi dan pembinaan Nilai-nilai Budaya, Mataram, hlm. 36.

Tradisi kawin lari pada masyarakat Sasak tersebut unik dan sekaligus menarik perhatian, karena di samping memperlihatkan adanya kesenjangan dengan nilai-nilai keislaman, juga dalam praktiknya sering melahirkan persoalan-persoalan sosial yang rumit, baik masa pelarian ataupun dalam proses penyelesaiannya. Pada masa pelarian misalnya, rentan terjadi berbagai implikasi negatif berupa kekerasan, pelecehan atau bahkan perzinahan. Demikian juga dengan proses penyelesaiannya, dapat menyebabkan konflik antara kedua belah pihak, sehingga dalam batas-batas tertentu dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, padahal pihak perempuan terlanjur dilarikan dan berada di rumah keluarga pihak laki-laki. Apabila ini terjadi, maka konflik sosial yang lebih besar tidak dapat dielakkan. Dengan fenomena inilah penulis tertarik meneliti lebih mendalam keberadaan tradisi kawin lari. Dalam kajian ini, maka telaah dari sudut pandang hukum perkawinan Islam tampaknya dapat dijadikan alternatif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah praktik adat *merariq* yang terjadi di masyarakat Sasak? *kedua*, bagaimana pandangan masyarakat Islam Sasak dan pandangan hukum perkawinan Islam terhadap praktik adat *merariq*? dan *ketiga*, bagaimana relevansi adat *merariq* dengan kehidupan masyarakat Islam Sasak?.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian

empiris-sosiologis (*das Sein*), yaitu cara mendekati masalah dengan melihat atau mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga mendapatkan gambaran secara utuh dan sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Lokasi penelitian di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pertimbangan Prapen dipilih sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini diidentifikasi sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi-tradisi, khususnya praktik adat *merariq*, dan disisi lain terdapat proses difusi norma Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Lebih lanjut di kelurahan ini banyak penduduk yang bergelar bangsawan dan juga terdapat masyarakat biasa sehingga dapat menggambarkan praktik *merariq* secara utuh.

Pengambilan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumen. Informan dipilih dengan cara *purposive sampling* sebanyak 38 informan. Informan terdiri dari pelaku kawin lari, orang tua kawin lari, pemuda-pemudi, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, pejabat instansi pemerintah seperti staf kelurahan, staf pengadilan agama, dan staf Kantor Urusan Agama (KUA), serta staf Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Adat dan Upacara Perkawinan Sasak

Sistem perkawinan *Merariq* di dalam tradisi masyarakat Sasak dapat diklasifika-

sikan menjadi tiga tahapan, yaitu: *pertama*, adat sebelum perkawinan; *kedua*, proses pelaksanaan *merariq*; dan *ketiga*, upacara adat setelah perkawinan.

a. Adat Sebelum Perkawinan Sasak

Tujuan perkawinan dalam masyarakat Muslim Sasak adalah seperti pada umumnya tujuan perkawinan yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan dalam pemilihan jodoh pada umumnya dan hal ini masih berlaku di masyarakat Kelurahan Prapen yaitu masih menganggap perkawinan dengan kerabat sendiri lebih baik jika dibandingkan dengan perkawinan dengan orang di luar kerabat atau keluarganya sendiri walaupun praktik ini terlihat ada kecenderungan menurun terutama di daerah perkotaan.

Dalam hal pemilihan jodoh di kalangan suku Sasak terdapat dua cara, yaitu *kemele mesaq* dan *suka lokaq*. Dari kedua cara ini, *kemele masaq* yang paling banyak dipraktikkan.⁷ Cara *pertama*, *kemele mesaq* adalah bentuk pemilihan jodoh berdasarkan pilihan sendiri. Biasanya pertemuan antara pemuda pemudi akan terjadi di berbagai kesempatan seperti saat panen tiba (potong padi di sawah), *bau nyale* (Lombok Tengah), pesta

Anjani (Lombok Timur), pada saat pengantaran jemaah haji, *presaian* (permainan adu kekuatan), dan pada pasar malam. Cara *kedua*, *Suka lokaq* atau pilihan orang tua. Cara ini seringkali dilakukan bilamana orang tua mereka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat.⁸

Suku Sasak mengenal lima bentuk perkawinan, yakni : *memagah*, *nyerah hukum*, *kawin gantung*, *belakoq* atau *memadi*, dan *merariq* (*memaling* atau kawin lari).⁹ Perkawinan dengan bentuk *memagah* adalah perkawinan yang diawali dengan cara melarikan perempuan secara paksa yang dilakukan siang hari untuk dijadikan isteri. Pelaksanaan *memagah* yaitu ketika perempuan tersebut lepas dari pengawasan orang tua atau keluarganya. Adapun sebab *memagah* ini dilakukan antara lain perempuan tersebut tergolong cantik di desa tersebut, sehingga sebagai seorang pemuda yang sangat menaruh hati tersebut khawatir kalau perempuan itu dilarikan terlebih dahulu oleh pemuda lain. Jadi dalam *memagah* ini terdapat unsur pemaksaan pihak laki-laki dalam mengawini pihak perempuan.

Perkawinan dengan bentuk *nyerah hukum* yaitu perkawinan yang pelaksanaannya termasuk pembiayaannya diserahkan kepada keluarga pihak perempuan yang bersangkutan. Perkawinan semacam ini biasanya terjadi karena pihak laki-laki kekurangan biaya atau karena statusnya se-

⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Husen (Tokoh masyarakat dan Wakil Kesbanglinmas Lombok Tengah), tanggal 28 Juli 2005.

⁸ Wawancara dengan Lalu Syafruddin. (Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) dan pakar hukum adat Sasak), tanggal 10 Agustus 2005.

⁹ Depdikbud, 1997, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Proyek Pariwisata Nusa Tenggara Barat, hlm. 34-39.

bagai pembantu rumah tangga atau lebih rendah statusnya dari perempuan yang akan dikawininya.

Perkawinan dengan bentuk *tadong* atau kawin gantung yaitu perkawinan yang terjadi antara seorang anak perempuan yang belum dewasa dengan seorang laki-laki yang belum dewasa. Dalam perkawinan semacam ini meskipun sudah dilangsungkan akad nikah secara sempurna dengan dipenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan mahar atau mas kawin, akan tetapi masa kumpul sebadan antara kedua orang tersebut ditunda sampai kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) tersebut menjadi dewasa dan pantas untuk dikawinkan.

Perkawinan dengan bentuk *belakok* atau *memadi*. Perkawinan macam ini disebut juga dengan melamar atau *khithbah*, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan meminta izin atau melamar perempuan secara resmi terlebih dahulu kepada orang tuanya untuk dijadikan isteri. Biasanya lamaran tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga bersama melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan bentuk *merariq*. Bentuk *merariq* merupakan bentuk perkawinan yang paling sering dilakukan pada masyarakat Sasak. Secara etimologis istilah *merariq* berasal dari bahasa Sasak “*berari*” berarti berlari. Hal ini mengandung dua makna.

Makna yang pertama adalah “lari” kedua menurut adat Sasak adalah “keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan, mulai dari penculikan si gadis sampai proses perkawinan selesai”.¹⁰ Oleh karena itu, wajar apabila bentuk *merariq* ini disebut juga dengan bentuk *memaling* (mencuri).

Terkait dengan status sosial, masyarakat Sasak lebih khusus lagi pada masyarakat Prapen, masih memegang teguh adat dan pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya perkawinan antara sepasang calon mempelai dalam kasta yang berbeda, terutama apabila kasta calon isteri lebih tinggi dari kasta calon suami yang bersangkutan. Pada jaman dahulu, seorang wanita bangsawan menikah dengan seorang laki-laki yang bukan bangsawan biasanya dibuang dan tidak diakui lagi sebagai keluarga oleh orang tuanya dan mengakibatkan status kebangsawanan wanita tersebut menjadi hilang. Ia tidak lagi disebut sebagai *Baiq* (panggilan gelar bangsawan perempuan), demikian pula dengan keturunannya.¹¹

b. Praktik dan Proses Pelaksanaan Adat Merariq Sasak

Terdapat perbedaan pendapat mengenai sejarah *merariq* dan munculnya praktik *merariq*. Selain itu, dalam buku Adat Sasak pun, tidak ada penjelasan secara detail tentang sejarah *merariq*. Sebagian orang menganggap *merariq* sebagai tradisi yang telah berlaku sejak dulu dan menjadi waris-

¹⁰ Ahmad Abdul Syakur, 2002, *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam ke dalam Kebudayaan Sasak)*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 384.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 386.

an nenek moyang.¹² *Merariq* merupakan pengaruh dari adat Bali, ketika kerajaan Karangasem Bali berkuasa di Lombok, *merariq* dikembangkan untuk memecah belah kekuasaan orang Sasak. Akibat lamanya masa penjajahan, *merariq* menjadi semakin mengental dalam tradisi perkawinan Sasak.¹³ Pendapat ini didukung oleh mayoritas seperti pakar adat, tokoh agama dan tokoh adat, mengatakan bahwa *merariq* bukan asli adat Sasak, adat Sasak yang asli adalah *khitbah*.¹⁴ Walaupun pelaksanaan *merariq* sekarang sudah banyak terjadi pergeseran, sudah tidak mengikuti adat secara utuh.¹⁵

Proses *Merariq* didahului dengan masa "*midang*". *Midang* adalah kunjungan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud untuk mengadakan perkenalan dan menjalin hubungan cinta. Jika masing-masing tertarik dan mengungkapkan perasaannya baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain (*subandar*) maka terjadilah suatu hubungan asmara yang disebut "*beberayean*". Masa ini ditandai dengan intensitas *midang* yang dilakukan. Tidak jarang pada masa ini, seorang pemuda memberikan aneka bingkisan bagi perempuan pujaannya untuk menunjukkan

bahwa laki-laki tersebut benar-benar mencintai perempuan.

Midang biasanya dimulai sesudah shalat Maghrib sampai maksimal sekitar jam 10.00 malam. Tetapi ada di antaranya *midang* yang dilakukan pada siang hari. Biasanya pemuda yang *midang* disambut oleh tuan rumah dan persilakan duduk di *berugaq*. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai *berugaq*, *midang* dilakukan di *sasangkok* (teras rumah). Seorang laki-laki yang pertama kali datang untuk *midang*, biasanya ditemui oleh ibu si gadis dan *midang* ini tidak hanya berkembang di kalangan mereka yang belum pernah menikah, bagi laki-laki yang sudah beristeripun akan melakukan *midang* bila ingin menikah lagi.

Pada akhir-akhir ini tampak adanya perubahan dalam praktik *midang* antara laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut dari yang semula bersifat tradisional dan terkontrol ketat oleh orang tua, karena dilakukan di rumah. Saat ini menjadi longgar dan tidak dikontrol lagi oleh orang tua dan keluarga, karena dapat dilakukan di berbagai tempat dan waktu, sehingga seringkali timbul berbagai akibat negatif, seperti perzinahan dan lain sebagainya.

¹² Hasil wawancara dengan Lalu Mukhtar (82 tahun) seorang tokoh masyarakat Sasak di Prapen, tanggal 2 September 2005, dan didukung oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang benar-benar tidak paham sejarah mereka selalu meyakini bahwa *merariq* ini lahir dari kebudayaan Sasak asli, begitulah pengakuan masyarakat pedalaman, penulis tidak menyebutkan satu-persatu.

¹³ Hasil wawancara dengan Lalu Salamudin (Pembayun Kelurahan Prapen), tanggal 27 Juli 2005.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Lalu Sohimun Faishol (Pengamat adat Sasak dan Dosen IAIN Mataram), tanggal 30 Agustus 2005.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Lalu Mudjithahid (Tokoh Majelis Adat Sasak dan dewan pendiri serta mantan Bupati Lombok Barat), tanggal 6 September 2005, dan wawancara dengan tiga tokoh agama yaitu Mustamiuddin Ibrahim (Rektor Universitas NW Mataram dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram), tanggal 23 Agustus 2005. Asnawi (Rektor IAIN Mataram) dan Lukman Al Hakim (Mantan Rektor IAIN Mataram), tanggal 23 Agustus 2005 di kampus IAIN Mataram.

Pada masa *midang* inilah disusun rencana perkawinan, termasuk yang berhubungan dengan “waktu lari bersama” akan dilakukan. Waktu dan strateginya disusun dengan jadwal yang jelas dan rapi untuk memperkecil terjadinya kegagalan. Semua rencana ini menjadi rahasia berdua calon mempelai. Bahkan kedua orang tuanya pun tidak diberitahukan. Dengan terjadinya “lari bersama” maka berakhirilah masa *midang* dan *beberayean*.

Selanjutnya *merariq* sendiri terdapat 2 (dua) pengertian. *Pertama*, *merariq* dalam arti yang sebenarnya yakni berlari: cara atau teknik seorang pria melarikan atau menculik seorang perempuan dari ikatan (pengawasan) orang tua serta keluarganya dengan tujuan untuk kawin. *Kedua*, *merariq* sebagai penamaan dari keseluruhan proses perkawinan menurut adat Sasak.¹⁶ Dalam bahasa sehari-hari kedua pengertian ini dipergunakan untuk kata *merariq*.

Dengan merunut pengertian di atas, kalau dilihat dari segi bentuknya, *merariq* dapat disamakan dengan “kawin lari”. Di dalam literatur hukum adat, dijelaskan bahwa “kawin lari” adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa peminangan secara formal. Proses perkawinan semacam ini kemudian dapat dibedakan menjadi 2 (dua). *Pertama*, “kawin lari bersama” (*weg-loopuweiijk*) yaitu dilakukan atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak; dan *kedua*, “kawin bawa lari” (*schaakhuweiijk*)

yaitu yang dilakukan secara paksa oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.¹⁷ Dari kedua kawin lari ini, penulis menyimpulkan bahwa *merariq* adalah kawin lari bersama, karena dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sementara “kawin bawa lari” kalau dikaitkan dengan bentuk-bentuk perkawinan Sasak, disebut *memagah* (kawin paksa).

Merariq ini lazim dilakukan di kalangan Muslim Sasak, seperti yang dilakukan oleh salah seorang pelaku *merariq* sebagai berikut:

*Merariq adalah membawa lari calon pengantin perempuan oleh pihak pengantin laki-laki atau perantaranya menuju salah seorang keluarganya, proses ini merupakan suatu kebiasaan kami disini, dan hampir semua orang Sasak melakukannya. Merariq telah menjadi warisan nenek moyang kami secara turun temurun. Waktu saya menikah pun saya membawa lari isteri saya di rumah paman saya.*¹⁸

Terkait praktik *merariq* ini salah seorang pejabat kelurahan Prapen memaparkan:

Bahwa menurut pengamatan yang terjadi di kelurahan Prapen hasil survey terhadap 30 pasangan pelaku perkawinan, menunjukkan bahwa sekitar 27 orang (90%) dari mereka kawin dengan proses merariq (pelarian), dan

¹⁶ Depdikbud (a), *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁷ Ter Har, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 188.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Lalu Mukhtar (tokoh masyarakat) diperkuat oleh warga masyarakat Prapen. Inaq Maryam, Inaq Sau dan Amirullah dan lain-lain, tanggal 27 Juli 2005.

*hanya 3 orang (10%) yang melakukan dengan cara belakok (peminangan). Jadi perkawinan dengan cara belakok ini sangat jarang dilakukan.*¹⁹

Bagi masyarakat Sasak, ada beberapa alasan mengapa tradisi *merariq* dilakukan. Pertama, *merariq* merupakan simbol keberanian dan memberikan kesan jiwa ksatria. Oleh sebab itu, bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan nilai lebih dan terhormat dari masyarakat adat. Sebaliknya, bagi pemuda Sasak yang tidak berani melakukan *merariq* mereka mendapatkan stigma sebagai seorang pengecut dan takut menghadapi risiko. Kedua, untuk menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Oleh karena itu, banyak orang tua yang tidak menyukai anaknya *dilakok* (dilamar) dan diberikannya begitu saja tanpa terlebih dahulu menempuh suatu tantangan dan hal inilah yang menjadi alasan perkawinan dengan cara *belakok* (melamar) itu sebagai suatu penghinaan, karena menurut mereka anak perempuan atau gadisnya bukanlah seperti *sirih seekor ayam* yang dapat diminta dan diambil begitu saja. Ketiga, alasan sejarah dan keempat, karena alasan kompetisi.

Sebagai bagian dari rentetan acara *merariq* adalah dilarikannya calon pengantin wanita oleh pihak calon pengantin laki-laki menuju kerumah salah satu keluarganya. Penculikan ini biasanya dilaksanakan antara waktu shalat Maghrib dan Isya atau

antara jam 18.30 sampai jam 20.00, ketika masyarakat pada umumnya sedang sibuk pergi ke masjid, makan, nonton televisi dan lain sebagainya.²⁰ Sementara di luar rumah pada malam yang telah ditentukan telah menunggu orang yang akan membawa si gadis di balik kegelapan malam, seraya memberikan isyarat yang sudah disepakati kepada perempuan yang bersangkutan, misalnya dalam bentuk siul.

Perempuan tersebut kemudian dibawa ke tempat persembunyian sementara (*bale penyeboan*). Tempat itu biasanya di rumah salah seorang keluarga laki-laki tersebut yang terletak di luar kampung perempuan. Persembunyian ini dilakukan untuk menghilangkan jejak agar keluarga perempuan tidak menemukan jika mereka melakukan pencarian. Karena jika pihak keluarga perempuan menemukan, kemungkinan perkawinan terancam gagal.

Selama berada di *bale penyeboan* kedua calon mempelai terikat dengan berbagai ketentuan adat yang ketat dan wajib dipatuhi. Ketentuan adat tersebut di antaranya tidak boleh tidur bersama di dalam satu tempat tidur, mencabuli, memperkosa dan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh kewanusiaan. Setelah proses penculikan dan persembunyian dilakukan, maka proses selanjutnya adalah *sejati*, *selabar* dan *ngawinang*.

1) *Sejati* atau *Besejati*

Setelah *merariq* terjadi, maka pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan ke-

¹⁹ Hasil wawancara dan survey dengan Lalu Muhammad Najib (Lurah Prapen dan tokoh masyarakat), tanggal 10 September 2005.

²⁰ Hasil wawancara dengan Lalu Salamuddin (Pembayun Prapen), tanggal 2 September 2005 dan pernyataan tambahan dari warga masyarakat Prapen.

jadian *merariq* ini kepada *keliang kampung* (kepala kampung) tentang keluarga laki-laki tersebut tinggal. Selanjutnya informasi akan disampaikan kepada pihak keluarga perempuan melalui *pembayun* secepatnya.²¹ *Pembayun* ini akan memberikan informasi itu kepada keluarga calon pengantin perempuan tentang kebenaran terjadinya *merariq* tersebut dan siapa yang telah membawa lari, kapan dan di mana calon pengantin perempuan dilarikan. Peristiwa inilah yang dinamakan *sejati* atau *besejati*.

Pesan *pembayun* tersebut kemudian disampaikan oleh *keliang kampung* secara langsung kepada orang tua atau keluarga pihak perempuan, kemudian di musyawarahkan berbagai masalah menyangkut tatakrama perkawinan setempat, termasuk berbagai pembayaran yang dibebankan kepada laki-laki. Semua ini menjadi catatan untuk kemudian disampaikan kepada utusan *selabar*.

2) *Selabar* atau *Bait Wali*

Setelah selesai *sejati*, maka proses selanjutnya adalah *selabar* yaitu meminta kesediaan orang tua gadis untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap puterinya. Hal ini disebut juga dengan *bait wali* yang berarti mengambil wali. Dalam *selabar* ini pula akan disepakati pembayaran adat yang disebut dengan *ajikrama*, yaitu sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai simbol (harga) dan status sosial dari pasangan calon

pengantin dan setiap keturunan yang akan mereka lahirkan. *Ajikrama* ini harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki yang bersangkutan, sebagai upaya untuk dapat melangsungkan akad nikah.²²

Di Prapen Praya selain *ajikrama*, pihak wanita mengenal istilah *pisuke* yakni permintaan pembayaran lain, seperti uang atau barang-barang berharga, yang intinya sebagai “pengobat atau penyenang” yang menjadikan *suke* (rela). *Pesuke* berfungsi sebagai penghibur rasa sedih orang tua yang akan ditinggal oleh puterinya. Dengan demikian, *pisuke* semata-mata merupakan permintaan orang tua untuk dirinya, meskipun kenyataannya, tidak sedikit yang mempergunakannya untuk keperluan kedua mempelai. Dalam penentuan *pisuke* inilah seringkali terjadi konflik.

Untuk mengakhiri konflik ini, masyarakat kelurahan Prapen Praya dan umumnya masyarakat Lombok, mempunyai dua kemungkinan solusi. *Pertama*, rencana perkawinan dibatalkan dan gadis dikembalikan kepada kedua orang tuannya. Namun solusi ini jarang terjadi, karena hal itu merupakan tindakan aib yang dapat merusak citra keluarga. *Kedua*, menempuh jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Agama, dalam kaitan ini, hakim diminta kesediaannya sebagai wali untuk menggantikan kedudukan wali yang sebenarnya. Namun hakim baru akan memberikan putusan setelah mempertimbangkan alasan-alasan dari kedua belah

²¹ Dapat dibaca Ratmadji dan Gde Parman, 1995, *Kitab Adat Sasak Dulang I*, tanpa penerbit, hlm. 17-20.

²² Jhon Ryan Bartholomew, 2001, *Alif Lam Mim, Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung*, alih bahasa, Imron Rosyidi, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 247. Dapat dilihat pula dalam Lalu Sohimun Faisol, “Intan Berlian: Meneguhkan Posisi Perempuan”, *Jurnal Ulumuna*, Volume VIII, Edisi 13, 2004, hlm. 191.

pihak. Dengan demikian hakim memiliki

otoritas penuh untuk mengabulkan atau menolak permintaan sebagai wali.²³

3) Ngawinang

Ngawinang (mengawinkan) atau juga disebut *nikahang* (menikahkan). *Ngawinang* adalah memberikan status hukum berdasarkan agama atas hubungan kedua mempelai, sehingga mereka dapat bergaul dan berhubungan secara sah sebagai suami isteri. Tanpa adanya proses *ngawinang* kawin lari dipandang tidak sah²⁴ yang pada umumnya diselenggarakan di rumah keluarga pihak laki-laki.

a. Upacara Adat Setelah Perkawinan

Upacara adat setelah *merariq* yaitu *sorong serah* dan *nyongkolan*. *Sorong serah* merupakan upacara yang diadakan untuk memberikan dan menyerahkan *ajikrama* serta denda-denda pelanggaran adat yang terjadi sejak masa pelarian sampai pelaksanaan pernikahan, yang besarnya denda sudah dibicarakan dalam upacara *selabar*. Menurut adat Sasak jika seorang isteri tidak diupacarakan dengan *sorong serah* maka ia tidak sah menjadi anggota keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak-anak isteri dan menurut adat anak tersebut bukan anak suaminya. Lebih lanjut dijelaskan bagi masyarakat patrilineal, anak-anak itupun tidak berhak mewarisi pusaka seperti tanah, ter-

nak, keris pusaka dan lainnya dari ayahnya.

Anak-anak tersebut hanya dapat menerima warisan dari pihak ibunya. Dalam hal ini, upacara berfungsi sebagai sarana pengu-
muman, publikasi dan pengenalan tentang suatu perkawinan.

Sedangkan *nyongkolan* atau disebut dengan *nyondol* adalah suatu upacara iring-iringan pengantin dari rumah pihak laki-laki menuju rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh musik-musik tradisional masyarakat Sasak, seperti *gendang beleq*, *rebana*, dan *kecimol*. Dengan selesainya prosesi *nyongkolan*, maka berakhirlah rangkaian prosesi adat perkawinan masyarakat Sasak dan pasangan akan tinggal sementara waktu di rumah orang tua laki-laki atau perempuan tergantung kesepakatan.

2. Pandangan Masyarakat Islam Sasak terhadap Adat *Merariq*

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat Islam Sasak terhadap adat *merariq*, terbagi menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan masyarakat biasa dan masyarakat terdidik. *Pertama*, pandangan masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat awam dan yang masih memegang teguh adat. Terkait *merariq* mereka memandang bahwa tidak ada masalah dalam adat *merariq* karena hal itu sudah berlaku secara umum dan dilakukan secara turun tem-

²³ Hasil wawancara dengan Khairil Anwar (Calon Hakim Pengadilan Agama Praya). Beliau memaparkan bahwa dalam tahun 2004-2005 terdapat lebih kurang delapan kasus perkawinan dengan permintaan wali hakim di Pengadilan Agama Praya. Kasus-kasus tersebut dijelaskan oleh responden tersebut tidak lain adalah pengaruh dari tradisi *merariq* ini, tanggal 4 September 2005.

²⁴ Hasil wawancara dengan Suparman (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya), tanggal 5 September 2005.

run. Selain itu, kelompok masyarakat ini memandang *merariq* adalah ciri khas bagi masyarakat Sasak yang perlu dipertahankan keberadaanya selama *merariq* dijalankan sesuai dengan ketentuan adat. Lebih lanjut di masyarakat Sasak berkembang persepsi bahwa dengan *merariq* dapat mempermudah proses pemilihan jodoh dalam perkawinan. Persepsi ini diikuti dengan adanya asumsi bahwa dengan *merariq* perkawinan dapat lebih langgeng bila dibandingkan dengan prosesi yang lainnya.²⁵

Kedua, pandangan masyarakat terdidik (berpendidikan). Kelompok ini melihat dari dua sisi yaitu sisi adat dan sisi pandangan Islam, seperti terlontar dalam ungkapan sebagai berikut:

Cara melarikan perempuan baik oleh calon suami atau orang lain, dengan niat untuk menikahinya. Cara ini merupakan pengaruh budaya Hindu Bali, yang sebaiknya dihilangkan dengan alasan, tidak semua budaya itu dilestarikan. Masih ada tawaran yang lebih baik, mudah dan lebih Islami dari itu. Alasan dilarang karena, pertama, dalam merariq itu sepertinya ada paksaan. Kedua, sering tidak memberikan kesempatan kepada keluarga wanita untuk merundingkan pelaksanaan pernikahan tersebut, banyak orang tua yang tiba-tiba anaknya hilang, justru membuat orang tua stres. Ketiga, calon isteri terkadang dipegang duluan. Ke-

*empat, menerima lamaran lebih dari satu, padahal jelas-jelas dalam hadis dilarang menerima pinangan orang, selama masih ada pinangan. Kelima, terkesan adanya unsur mengelabui si wanita.*²⁶

Pendapat di atas diperkuat oleh responden lain, dalam wawancaranya sebagai berikut :

*Saya pribadi kurang setuju terhadap proses adat merariq. Dengan alasan praktik semacam itu tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Akan tetapi hukum adat atau budaya itu dapat berlaku dan dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, apalagi masyarakat Sasak ini adalah masyarakat yang mayoritas Islam dan fanatik agama, bagaimana dapat berjalan dengan baik kalau tradisi tersebut bertentangan dengan masyarakat yang mayoritas, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keributan, di satu sisi merasa aman, dan di sisi lain tidak merasa aman. Kalau anak saya laki-laki mau menikah saya melamar pihak perempuan yang menjadi calonnya, dan apabila anak saya perempuan, calon laki-lakinya harus dengan cara melamar.*²⁷

Jadi kesimpulan dari pandangan kelompok terdidik adalah mereka menyarankan perlu ditinjau kembali keberadaan tradisi *merariq*, dengan beberapa alasan.

²⁵ Hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami isteri di Kelurahan Prapen. Pada tanggal 30 Agustus 2005.

²⁶ Hasil wawancara dengan MN salah seorang Tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat, yang merupakan pakar hukum Islam dan pengamat hukum adat, tanggal 23 Agustus 2005.

²⁷ Hasil wawancara dengan AD; salah seorang tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Pertama, tradisi tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sekarang; *kedua*, prosesnya sering menimbulkan konflik; *ketiga*, banyak orang tua yang kaget tiba-tiba anaknya di bawa lari (kehilangan); *keempat*, sering terjadi unsur mengelabui dan juga pemaksaan terhadap pihak perempuan; dan *kelima*, prosesnya rumit dan berbelit-belit.

3. Relevansi Adat *Merariq* dengan Kehidupan Masyarakat Islam Sasak

Dalam perjalanan waktu muncul tokoh-tokoh pembaharu yang berusaha mengkaji ulang tradisi yang masih berlaku dengan tujuan untuk menggantikan yang kurang sesuai atau untuk memperbaiki sebagian yang masih bisa dipertahankan, tokoh ini mencoba mencari makna baru dari tradisi ini, sesuai dengan perkembangan tingkat kehidupan masyarakat.

Masalah proses perkawinan dengan sistem *merariq*, yang semula prosesnya cukup panjang dan berbelit-belit, dari mulai mencuri gadis, *nyelabar*, *nuntun wali*, *sorong serah*, secara evolusi aktualisasi juga semakin berkurang. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan dengan sistem *merariq* tersebut sudah berhenti sama sekali, akan tetapi upacaranya sudah tidak seketat dahulu. Bahkan kini sudah mulai ada yang menggunakan sistem *belakok*, *ngendeng* (melamar) sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mungkin saja terjadi, karena sistem *khitbah* (melamar) tersebut tampaknya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Terutama dalam menghadirkan wali nikah. Sementara, sistem *merariq* ini cenderung menimbulkan kesulitan bagi yang bersangkutan, padahal Islam sendiri mengungkapkan kepada umatnya untuk mempermudah masalah dan tidak

mempersulitnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Bagi yang masih melaksanakan *merariq*, rangkaian adat *merariq* seperti tradisi *sorong serah* dan prinsip *aji krama* sebagian sudah mulai ditinggalkan, karena dinilai menyulitkan. Adat *nyongkol* masih dipertahankan.

4. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Adat *Merariq*

Dalam menganalisis hal-hal tersebut, ada tiga hal yang dijadikan pedoman. *Pertama*, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perkawinan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. *Kedua*, mengacu kepada kemaslahatan yang membawa manfaat dan mudharat yang ditimbulkannya. *Ketiga*, analisis dengan mengacu pada teori Hazairin: *reseptie a contrario*, menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

a. Analisis terhadap Proses Menuju Adat *Merariq* Sasak (*Midang*, *Beberayean* dan *Pelarian Diri*)

Perkawinan dalam masyarakat Sasak biasanya diawali dengan proses *midang*, *beberayean*, dan *merariq*. *Midang* dan *beberayean* lebih mencerminkan upaya antara kedua pasang pemuda dan pemudi ini untuk saling *ta'aruf*, mengenal dan memahami sifat dan kepribadian masing-masing calon, sehingga mereka mendapatkan calon pendamping hidup yang ideal untuk dinikahi. Sedangkan *merariq* merupakan ekspresi dan tindakan riil terhadap tuntutan hati dan perasaan untuk menikah.

Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut di atas, *midang*, *beberayean*, dan *pelarian diri* ataupun *khitbah* dalam hukum perkawinan

Islam, secara substansi memiliki tujuan yang sama yaitu mencari calon pasangan hidup yang ideal dan cocok agar dapat melakukan perkawinan atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Atas dasar inilah, ketentuan dan prinsip-prinsip *khitbah* menurut ajaran Islam, kiranya dapat dijadikan sebagai sandaran dan landasan untuk mengukur keberadaan adat *merariq* Sasak khususnya pada tahap proses awal menuju perkawinan. Proses awal menuju perkawinan Sasak, dalam beberapa hal sebenarnya telah mengakui adanya ketentuan-ketentuan tersebut, seperti mengakui adanya batasan bahwa *merariq* itu hanya dapat dilakukan dengan perempuan yang boleh dikawini. Namun demikian, dalam kenyataan masih sering terjadinya penyimpangan, baik dari aspek normatif maupun kemaslahatan umum. Penyimpangan-penyimpangan itu dapat diperhatikan kajian berikut ini.

Pertama, tradisi *midang* dan *beberayean* dengan seorang wanita pada malam hari dan tanpa ditemani oleh mahramnya, dapat dikategorikan sebagai tindakan berduaan (*khalwah*) dapat menjerumus perbuatan zina. Padahal, mendekati zina merupakan perbuatan yang dilarang agama. Atas dasar inilah Rasulullah SAW secara tegas menyatakan "bahwa laki-laki tidak boleh berduan dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya".

Kedua, dalam *midang* dan *beberayean*, tradisi Sasak membenarkan adanya kompetisi antar beberapa orang laki-laki untuk merebut hati dan perasaan seorang perempuan. Akibat dari hal tersebut, seorang perempuan dapat saja memiliki beberapa

orang *beraye* (kekasih), meskipun diantara mereka hanya satu yang masuk dalam hatinya. Memang dibenarkan dalam kitab Adat Sasak dikatakannya: "Laki-laki yang *midang* di tempat yang satu boleh *midang* lagi di tempat yang lain". Jadi dibenarkan *midang* secara bergiliran pada malam yang sama. Memang pelaksanaan seperti ini terkesan pemuda Sasak bebas memilih dan dapat dianggap mempunyai kebebasan dalam hal pemilihan jodoh, tetapi hal ini rentan menimbulkan permusuhan antara *beraye* (kekasih). Dalam kaitan ini, maka adat tradisi *midang* dan *beberayean* itu dapat dianggap tidak sesuai dengan hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim dan Uqubah bin Amir, yang mengajarkan: "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, dia tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya dan tidak boleh pula meminang perempuan sedang dipinang saudaranya, hingga saudaranya meninggalkannya". Hikmah dari larangan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang itu.

Ketiga, melakukan lari bersama untuk kawin bertentangan dengan ketentuan lahiriyah ayat dan hadist Nabi yang mengharuskan adanya izin sebelum perkawinan dari wali, ayah wanita yang hendak dikawini, atau kakeknya, atau saudaranya dan keluarga lain yang berhak sesuai urutan dalam ketentuan hukum Islam, walaupun segera setelah dilarikannya perempuan keluarga pemuda akan memberitahukan tentang adanya *merariq*. Sebagaimana firman Allah menyebutkan bahwa harus ada ijin dari wali dan perijinan dilakukan pada saat melamar (*khitbah*):

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya" (QS. An-Nisa [4] : 25)²⁸.

Pada aspek lain, meskipun perkawinan dengan pelarian atau membawa lari gadis tersebut sebagai adat tradisi, namun dalam praktiknya seringkali melahirkan berbagai implikasi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Implikasi negatif yang sering terjadi adalah adanya perzinahan ataupun kekerasan seksual sehingga perempuan tidak punya pilihan lain selain menerima pemuda sebagai suaminya ataupun adanya permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *midang*, *beberayean* dan proses pelarian, dapat memperlihatkan bahwa, walau dalam proses adat *merariq* Sasak memperlihatkan adanya kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, namun dari sisi kemudharatan dan sisi negatifnya baik dari sudut normatif maupun kemaslahatan umat lebih dominan sehingga keberadaan atau praktik *merariq* ini perlu ditinjau kembali. Pandangan ini akan lebih kuat, bila dikaitkan dengan kaidah-kaidah atau konsep Islam, antara lain: *Pertama*, kaidah yang mengatakan : "Menolak segala bentuk ke-

mafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".²⁹ *Kedua*, konsep Islam, seperti *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu: "Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan". Maksudnya, seorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir dengan kemafsadatan." (al-Syathibi).³⁰

b. Analisis terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Adat Merariq Sasak

1) Analisis terhadap Masalah Wali dan Pisuke

Kedudukan wali bagi perempuan yang hendak menikah pada masyarakat Prapen, dapat dipahami sebagai upaya implementasi dari bagian syari'at Islam. Sebab dalam ajaran Islam kedudukan wali merupakan "rukun" artinya harus ada dalam perkawinan tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi landasan yuridisnya, sesuai dengan hadist Nabi SAW: "Barangsiapa di antara kalian yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal". (HR. Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dan diperkuat dengan hadist lain, dalam riwayatnya: "Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya

²⁸ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, hlm. 82.

²⁹ Nasrun Harun, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 190.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

sendiri” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).³¹

Pada masyarakat Sasak kewajiban adanya wali, merupakan sesuatu yang penting, hal ini ada dalam ketentuan adat. Atas argumentasi dan dasar itulah sehingga masyarakat Sasak benar-benar menempatkan wali pada unsur yang sangat penting, dengan adanya *merariq* ini, seakan-akan posisi laki-laki berada diposisi yang lebih rendah, terlebih lagi adanya suatu ketentuan jika seorang laki-laki sudah melakukan *merariq* adalah suatu keharusan baginya untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga seringkali hal ini yang membuat pihak keluarga perempuan meminta kompensasi tinggi (*pisuke*) sebagai syarat kesediannya menjadi wali pernikahan. *Pisuke* ini dapat berupa uang atau barang berharga lainnya kepada pihak laki-laki.

Pisuke umumnya sebagai biaya adat perkawinan, akan tetapi tidak menyerupai mahar seperti dalam Islam. Pembayaran uang *pisuke* ini menjadi syarat utama bagi kesediaan wali untuk menikahkan anaknya, apabila uang ini belum diserahkan perwalianpun belum diberikan. Maka calon mempelai laki-laki pada masyarakat Sasak secara keseluruhan di samping berkeharusan memberikan mahar juga diwajibkan membayar uang permintaan (*pisuke*) yang besarnya tergantung permintaan dari wali perempuan.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa permintaan orang tua perempuan (*pisuke*) tersebut, kalau ditinjau dari hukum Islam maka tidak wajib karena hal tersebut bukanlah mahar, seperti yang diwajibkan, melainkan

hanya sebagai permintaan atau pemberian yang hukumnya mubah serta dapat dilakukan atau ditinggalkan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan di daerah setempat. Dengan demikian Islam menganjurkan agar dalam hal pemberian dan penentuan mahar ini dengan cara yang ringan dan mudah. Prinsip ini seyogyanya diaplikasikan pada kebiasaan permintaan *pisuke* yang berlaku sebagai adat kebiasaan di masyarakat Sasak.

2) Analisis terhadap Legalitas Adat Merariq Sasak

Pada dasarnya, adat *merariq* Sasak dalam beberapa hal terindikasi adanya kesenjangan dengan ketentuan hukum Islam baik dilihat dari sudut normatif maupun kemaslahatan, namun tidak berarti bahwa proses adat *merariq* Sasak tersebut tidak sah. Legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak menempatkan pada proses menuju pernikahan, seperti *khibah* atau pelarian diri, melainkan lebih mengamati pada akadnya, apakah sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah atau belum. Jika rukun dan syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya proses perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika rukun dan syarat tersebut belum lengkap maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Walaupun rukun dan syarat perkawinan dikalangan para ulama sendiri masih berbeda pendapat, namun faham Syafi'iyah yang juga diresepsi oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun-rukun perkawinan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan *qabul*.

³¹ Lihat dalam bukunya Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 42.

Proses adat *merariq* masyarakat Sasak, kalau diperhatikan dari rukun-rukun dan syarat-syarat hukum Islam tersebut, telah menerapkan ketentuan sesuai dengan hukum Islam. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prosesi *ngawinang* atau *nikahang* merupakan satu-satunya rangkaian prosesi perkawinan Sasak yang secara sempurna mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Di samping terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat hukum Islam tersebut, proses adat *merariq*, sebagaimana halnya perkawinan pada umumnya yang berlaku di Indonesia, masyarakat Sasak juga melakukan pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, supaya diakui eksistensi dan legalitasnya menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akad perkawinan dalam proses adat *merariq* Sasak (*ngawinang* atau *nikahang*) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum Islam, karena semuanya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat, serta mendapat eksistensi dan legalitas dari pemerintah, karena perkawinannya dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis secara kualitatif dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, adat *merariq* merupakan bentuk pernikahan yang unik. Dalam pelaksanaannya *merariq* ini sering menimbulkan implikasi negatif terlebih tidak kuatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan praktik tersebut serta praktik *merariq* ini sudah tidak seketat se-

perti dahulu dan adanya pergeseran nilai di dalam masyarakat. Implikasi negatif ini tidak saja dari pihak perempuan tetapi juga pihak laki-laki. Pada pihak perempuan sering terjadi kekerasan seksual dan pada pihak laki-laki sering memberatkan karena adanya permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi.

Kedua, terkait pandangan masyarakat Islam Sasak mengenai *merariq* ada 2 (dua) pendapat. *Pertama*, oleh masyarakat biasa yang mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam *merariq*. *Kedua*, yaitu dari masyarakat terdidik (berpendidikan), mereka lebih melihat pada dampak *merariq* mulai dari proses awal sampai akhir. Sehingga mereka berpendapat sebaiknya dicarikan alternatif yang lebih baik karena tidak ada ketentuan dalam hukum Islam tentang praktik ini dan ditambahkan lagi bahwa tidak semua budaya harus dilestarikan.

Terkait prosesi adat *merariq*, jika dilihat dari pandangan hukum Islam peneliti menyimpulkan terdapat kesenjangan dengan ketentuan hukum Islam, baik itu ditinjau dari sudut normatif maupun kemaslahatannya. Oleh karena itu, dari sisi kajian hukum Islam, adat *merariq* ini merupakan adat yang kurang baik, walaupun pada akad perkawinannya adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan telah mendapatkan legalitas dari negara.

Dengan memperhatikan hasil penelitian di atas dapat disarankan bahwa perlu adanya pengkajian kembali adat perkawinan Sasak, sebab adat Sasak yang sebenarnya adalah melamar, (*memadiq/ngendeng*). Bentuk inilah yang dikehendaki hukum Islam, karena dengan cara seperti ini mencerminkan bimbingan dan petunjuk hukum Islam. karena

caranya sangat sederhana. Kembangkan dan lestarikan adat istiadat yang Islami, sehingga mencerminkan nilai-nilai ajaran agama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu untuk menghilangkan penyimpangan

yang terjadi pada tradisi *merariq* diperlukan keterlibatan semua elemen yaitu tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat, dan masyarakat Islam Sasak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Z., 1995, *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung.
- Adji, Sution Usman, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 12 Desember 2005, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bartholomew, Jhon Ryan, 2001, *Alif Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung*, alih bahasa, Imron Rosyidi, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Bashir, Azhar, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Budiwanti, Erni, 2000, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Wetu Lima*, LKIS, Yogyakarta.
- Depdikbud, (1991a), *Adat Istiadat Perkawinan di Lombok*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. Mataram-NTB.
- _____, (1997b), *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Proyek Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Mataram-NTB.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Faisol, L. Sohimun, "Intan Berlian: Meneguhkan Posisi Perempuan", *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulu-muna*, Vol. VIII, Edisi 13, 2004.
- Haar, Ter, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Sabiq, as-Sayyid, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II. Dar al-Fath li al-A'lam al 'Arabi, Kairo.
- Sabiq, Sayyid, 1989, *Fikih Sunnah*, Jilid 6. PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Syakur, Ahmad Abdul, 2002, *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)*, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

